



E-journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)

KETIMPANGAN WILAYAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

Farida Aliyatul Asy'ariati¹, Heru Wahyudi², Asih Murwiati³, Tiara Nirmala⁴, Arivina Ratih Yulihar Taher⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Studi Ekonomi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

Informasi Naskah

Update Naskah:

Dikumpulkan: 14 April 2022

Diterima: 21 Mei 2022

Terbit/Dicetak: 29 Juni 2022

Keywords:

Economic Growth, Income Inequality, and Random Effects Model.

Abstract

In addition to economic growth, regional inequality is also an important issue for the development of every country. Theoretically and supported by many empirical studies, it is proven that high economic growth has an impact on regional inequality. Regional inequality is related to the income received by people in a country. Panel data is the data used in this study with the best method, namely the best Random Effect Model using the Eviews 9.0 analysis tool for regression. Based on the results of data processing, the average food expenditure and the number of poor people have a significant and positive effect on regional inequality in districts/cities in Lampung, while the average non-food expenditure and the average length of schooling have no significant effect. Economic inequality between regions is a common aspect of the economic activities of a region. Inequality arises due to differences in the content of natural resources and differences in demographic conditions found in each region. So that the ability of a region in the development process will also be different. Therefore, in each region, there is a developed region and a backward region.

A. PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup latar belakang atas isu atau permasalahan serta urgensi dan rasionalisasi kegiatan (penelitian atau pengabdian). Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah disajikan dalam bagian ini. Tinjauan pustaka yang relevan dan pengembangan hipotesis (jika ada) dimasukkan dalam bagian ini. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan suatu negara. Secara agregat pertumbuhan ekonomi dilihat melalui pencapaian nilai total Produk Domestik Bruto atau PDB suatu negara. Dalam komponen pertumbuhan itu sendiri. Todaro & Smith (2015) membagi tiga komponen penting pertumbuhan ekonomi, pertama adalah akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketrampilan kerja. Kedua, pertumbuhan jumlah penduduk yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi atau cara-cara baru menyelesaikan pekerjaan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pembangunan suatu negara, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap

* Corresponding Author.

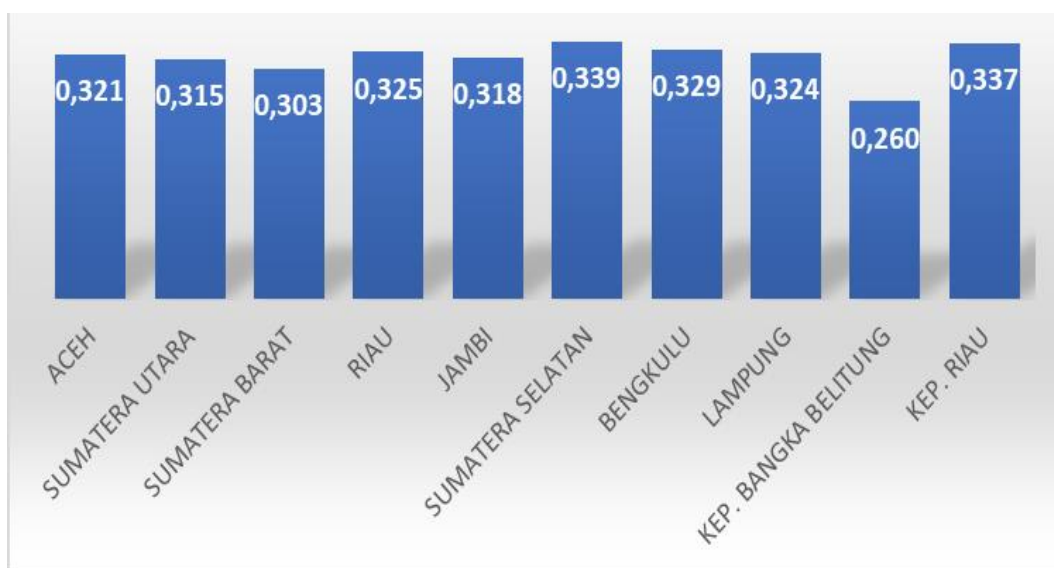
Farida Aliyatul Asy'ariati, e-mail : faridaaliya400@gmail.com

masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2015). Secara singkat, pembangunan bertujuan mensejahterakan warga masyarakat tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga non ekonomi.

Selain pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan (*income inequality*) juga menjadi isu penting bagi pembangunan setiap negara. Secara teoritis dan didukung oleh banyak penelitian empiris terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan berkaitan dengan pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata. Kondisi ini pada akhirnya akan memperbesar kesenjangan (*gap*) antara masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif baik (kelompok kaya) dengan mereka yang berpendapatan rendah (kelompok miskin).

Pertumbuhan ekonomi akan lebih bermakna apabila dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata yang sering kali diikuti dengan perubahan struktur pendapatan, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Masalah dihadapi di Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat atau jumlah orang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Rycroft, 2018).

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara sedang berkembang, tidak terkecuali di Indonesia (Rycroft, 2018). Meskipun Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan, baik perekonomian maupun pemerintahan, nyatanya kondisi ini masih menimbulkan masalah pembangunan bagi dua provinsi tersebut dengan indeks ketimpangan wilayah yang masih tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1. Ketimpangan Wilayah di Sumatera Tahun 2020 (indeks).

Kondisi wilayah Indonesia pada tahun 2020 sebesar 0,38 indeks, ketimpangan tertinggi di Pulau Sumatera adalah Sumatera Selatan yaitu sebesar 0,339 indeks sedangkan ketimpangan adalah Bangka Belitung yaitu sebesar 0,260 indeks. Provinsi Lampung berada di posisi urutan 5 tertinggi setelah Sumatera Selatan (0,339 indeks), Kepulauan Riau (0,337 indeks), Bengkulu (0,329 indeks) Riau (0,325 indeks). Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan merupakan sebuah realita yang ada ditengah-tengah masyarakat dunia baik di negara yang maju maupun negara berkembang yang juga merupakan isu penting untuk di tinjau dan perlu adanya berbagai upaya dari pemerintah dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, serta peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai macam usaha dalam rangka peningkatan dari berbagai macam aspek yang ada (Kalalo et al., 2016). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketidakmerataan terjadi di seluruh dunia, jadi masalah ini juga terdapat pada negara-negara yang sudah maju namun yang terjadi di negara-negara

maju lebih kecil atau sudah tidak terlihat jelas dibandingkan yang terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2021

Gambar 2. Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota di Lampung Tahun 2018-2020.

Selain itu, kondisi ketimpangan wilayah tidak bisa dilepaskan dari keadaan demografis dan ketenagakerjaan. Hasil penelitian Kalalo et al. (2016) menunjukkan bahwa penduduk merupakan salah satu penyebab meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Di lain sisi, meskipun penduduk membawa pengaruh yang tidak baik terhadap ketimpangan, dengan menekan dan mengupayakan tingkat pengangguran yang rendah ketimpangan diharapkan akan berkurang.

Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Seperti yang dikemukakan oleh Engel (1857) bahwa bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan, hukum ini ditemukan Engel berdasarkan data survei pendapatan dan pengeluaran. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan. Pergeseran komposisi dan pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan secara umum rendah, sedangkan elastisitas permintaan terhadap kebutuhan bukan makanan relatif tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan, sedangkan sisa pendapatan dapat disimpan sebagai tabungan/investasi.

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, sedangkan pergeseran komposisi pengeluaran dapat mengindikasikan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk. Secara umum pengeluaran dibagi menjadi dua bagian yakni pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran non makanan.

Pada tingkatan kabupaten/kota, tidak semua kabupaten/kota mengalami perubahan pola konsumsi makanan dari 2019 ke 2020 seperti Provinsi Lampung. Dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, lebih dari setengahnya atau sebanyak 9 kabupaten/kota justru mengalami peningkatan pengeluaran untuk konsumsi makanan. Kabupaten/kota dengan peningkatan konsumsi makanan

terbesar terjadi di Kota Metro dengan persentase konsumsi makanan (terhadap total pengeluaran) pada tahun 2019 sebesar 41,39 persen menjadi 45,65 persen pada tahun 2020. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Lampung Utara, dimana kabupaten tersebut merupakan kabupaten dengan penurunan konsumsi makanan tertinggi di Lampung. Pada tahun 2019 pengeluaran untuk konsumsi makanan di Kabupaten Lampung Utara ialah sebesar 57,52 persen dan menurun menjadi 52,98 persen di tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya diadakan studi lebih lanjut tentang kausalitas perubahan pola konsumsi ini, khususnya korelasinya dengan PDRB dan ketimpangan pendapatan setiap daerah.

Hasil kajian Williamson (2018) menemukan bahwa 80 persen perbedaan pertumbuhan perekonomian antarnegara adalah disebabkan oleh faktor modal fisik dan modal manusia sedangkan 20 persen lagi sisanya karena faktor-faktor lain. Bila manusia mampu mengoptimalkan potensinya maka ia akan dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk kesejahteraan bersama. Manusia dapat mempunyai akses pada sumber daya ekonomi serta dapat memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesehatannya untuk bekerja agar dapat hidup dengan layak. Proses pembangunan harus dapat merealisasikan harapan-harapan tersebut. Fokus pada manusia inilah yang melandasi konsep pembangunan manusia.

Dua sisi pembangunan tersebut harus berkembang secara seimbang. Ketimpangan akan berakibat pemborosan potensi manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek kehidupan manusia. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM. *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan IPM sejak tahun 1990. Dalam perjalanannya, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM. Hingga tahun 2010 UNDP melakukan revisi yang cukup besar dengan menyebutnya sebagai era baru pembangunan manusia. Dalam metode baru ini dikenalkan indikator harapan lama sekolah yang menggantikan indikator melek huruf dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita (Conceicao, 2020).

Potret pembangunan sumber daya manusia masih terlihat rendah kualitasnya. Penduduk miskin di Provinsi Lampung pada September 2020 tercatat mencapai 1,09 juta orang atau sebesar 12,76 persen dari total penduduk. Jumlahnya bertambah sebanyak 41,82 ribu orang dibanding kondisi Maret 2020 yang mencapai 1,05 juta orang (12,34 persen). Sumber daya manusia Provinsi Lampung tahun 2020 yang tercermin dari angka indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 69,69 masih berstatus "sedang". Walaupun Indeks Ketimpangan Gini Rasio sebesar 0,320 pada September 2020 menunjukkan kondisi yang lebih baik dari Indonesia sebesar 0,399. Tingkat ketimpangan antarwilayah yang rendah belum tentu merefleksikan keberhasilan kebijakan distribusi pembangunan. Tingkat ketimpangan yang rendah bisa jadi mencerminkan tingkat pembangunan yang rendah dan merata di seluruh wilayah. Sebaliknya ketimpangan yang terlalu tinggi bisa berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi, memperlambat pengentasan kemiskinan.

Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak menjadi masalah selama produktivitas penduduk daerah yang bersangkutan juga tinggi sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan timpang. Permasalahan akan muncul ketika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang akan berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu jumlah penduduk muda dan tua juga akan berpengaruh pada produktivitas penduduk. Rasio dependensiyang

tinggi akibat besarnya jumlah penduduk usia muda dan tua juga akan memengaruhi kondisi ekonomi suatu wilayah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembangunan Ekonomi

Todaro & Smith (2015) menjelaskan bahwa pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional; serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Lebih lanjut, Todaro & Smith (2015) menjelaskan tiga tujuan inti pembangunan yaitu:

- a) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan yang pokok, seperti pangan sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
- b) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau bangsa-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Pendapat yang sama diutarakan oleh Amartya Sen dalam Todaro & Smith (2015) bahwa “kapabilitas untuk berfungsi (*capabilities to function*)” adalah yang paling menentukan status miskin-tidaknya seseorang. Dari apa yang telah dijelaskan, pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan dan kebebasan.

2. Ketimpangan Antar Daerah

Kesenjangan atau ketimpangan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan (Baidhawry, 2015). Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang (Jhingan, 2011). Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah terbelakang (Andiny & Mandasari, 2017).

Menurut Alam & Tjahya (2007) menyatakan bahwa ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.

North (1955) memunculkan ketimpangan antar wilayah dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori ini dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa tersebut dikenal sebagai hipotesa Neo Klasik. Menurut hipotesa Neo Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan cenderung mengalami peningkatan terus-menerus. Hal ini akan terus terjadi sehingga ketimpangan mencapai titik puncak. Apabila proses pembangunan berlanjut, maka ketimpangan pembangunan akan mengalami penurunan. Berdasarkan

hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi pada negara yang sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya pada negara yang maju. Dengan kata lain kurva ketimpangan pembangunan berbentuk kurva U-terbalik.

3. Indeks Williamson

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar kabupaten yang terjadi pada Provinsi Lampung, dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional in equality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Perhitungan Ketimpangan Untuk mengetahui perhitungan ketimpangan pendapatan maka digunakan Indeks Williamson (Zaili et al., 2020).

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y}$$

Keterangan:

Dimana IW adalah Indeks Williamson, y_i adalah PDRB perkapita di Kabupaten/ Kota i , y adalah PDRB perkapita rata-rata Provinsi Lampung, f_i adalah jumlah penduduk di kabupaten/kota i , dan n adalah jumlah penduduk Provinsi Lampung.

4. Konsumsi

Konsumsi merupakan pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan (Arifin, 2018). Pembelanjaan rumah tangga atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan sebagai pembelanjaan atau konsumsi. Jumlah konsumsi yang dikeluarkan setiap orang dipengaruhi oleh keanekaragaman kebutuhannya. Keanekaragaman kebutuhan yang harus dipenuhi mendorong seseorang untuk melakukan pilihan konsumsi primer dan sekunder. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi (Hasang & Nur, 2020).

Konsumsi rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu konsumsi makanan dan non makanan. Konsumsi pangan terdiri dari padi, umbi, ikan, daging, telur, sayuran, kacang-kacangan, buah, minyak, bahan minuman, bumbu dapur, konsumsi lainnya serta makanan dan minuman jadi, sedangkan konsumsi non makanan terdiri dari perumahan yang meliputi listrik dan air, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pakaian dan alas kaki, pajak pemakaian dan asuransi, keperluan pesta dan upacara, aneka barang dan jasa dan barang yang tahan lama (Bahrun et al., 2014).

5. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formal (tidak termasuk tahun ujian). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah diperlukan informasi tentang: partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang ditekuni, ijazah tertinggi yang dijabat, jenjang/kelas tertinggi yang pernah/sedang ditekuni. Untuk melihat kualitas penduduk dari segi pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah maksimum adalah 15 tahun dan minimum adalah 0 tahun (standar Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Rata-rata lama sekolah menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang ditempuh. Anggapan umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik dalam hal berpikir maupun bertindak. Atmanti (2005), mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, diukur dengan lama sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik daripada orang dengan pendidikan yang lebih rendah.

6. Penduduk

Badan Pusat Statistik (2011) mendefinisikan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Hasang & Nur (2020) mengatakan penduduk adalah orang yang mantranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Didu & Fauzi (2016) mengatakan penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara.

Bertambahnya penduduk justru akan menciptakan/memperbesar permintaan secara keseluruhan, terutama untuk investasi. Pertambahan penduduk itu tidak sekedar sebagai tambahan penduduk melainkan juga sebagai suatu kenaikan dalam daya beli (*purchasing power*). Oleh karena itu apabila terjadi penurunan jumlah penduduk, maka akan menyebabkan turunnya rangsangan untuk mengadakan investasi sehingga mengakibatkan permintaan juga akan turun. Jika perkembangan penduduk tertunda maka akan mempunyai perkiraan bahwa pasar akan semakin sempit. Namun sebaliknya, jika penduduk tidak berkualitas, maka perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Oleh karena itu adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut adanya pembangunan ekonomi yang terus menerus.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini meneliti 13 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Lampung. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, buku bacaan dan sumber dari media *online* sebagai referensi yang dapat menunjang penulisan ini. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ketimpangan pendapatan, rata-rata pengeluaran makanan, rata-rata pengeluaran non-makanan, rata-rata lama sekolah, dan jumlah penduduk miskin menggunakan data panel dari tahun 2016-2020.

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar kabupaten yang terjadi pada Provinsi Lampung, dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional in equality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Perhitungan Ketimpangan Untuk mengetahui perhitungan ketimpangan pendapatan maka digunakan Indeks Williamson (J. G. Williamson, 1965).

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y}$$

Keterangan:

Dimana IW adalah Indeks Williamson, y_i adalah PDRB perkapita di Kabupaten/ Kota i , y adalah PDRB perkapita rata-rata Provinsi Lampung, f_i adalah jumlah penduduk di kabupaten/kota i , dan n adalah jumlah penduduk Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu:

1. Rata-rata pengeluaran makanan, konsumsi makanan terdiri dari konsumsi yang meliputi padi-padian, sayur-sayuran dan kebutuhan makan lainnya yang merupakan barang tidak tahan lama. Data rata-rata pengeluaran makanan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rata-rata pengeluaran makanan yang dipublikasi oleh BPS dalam satuan rupiah.
2. Rata-rata pengeluaran non makanan, konsumsi non makanan terdiri dari perumahan yang meliputi listrik dan air, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pakaian dan alas kaki, pajak pemakaian dan asuransi, keperluan pesta dan upacara, aneka barang dan jasa dan barang yang tahan lama. Data rata-rata pengeluaran non-makanan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rata-rata pengeluaran non-makanan yang dipublikasi oleh BPS dalam satuan rupiah.
3. Rata-rata lama sekolah, batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun (standar UNDP). Data rata-rata lama sekolah dalam bentuk data tahunan yang diperoleh dari BPS Provinsi Lampung.
4. Jumlah penduduk miskin merupakan masyarakat yang pengeluarannya atau pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan (Haughton & Khndker, 2009). Data jumlah penduduk miskin diperoleh dari BPS Provinsi Lampung.

Model penelitian ini menggunakan persamaan data panel yang menguji pengaruh rata-rata pengeluaran non-makanan, rata-rata pengeluaran makanan, rata-rata lama sekolah, dan jumlah penduduk miskin terhadap ketimpangan wilayah dibutuhkan spesifikasi model sebagai berikut:

$$IW_{it} = \beta_0 + \beta_1 LN_MK_{it} + \beta_2 LN_NM_{it} + \beta_3 LN_LS_{it} + \beta_4 LN_PM_{it} + \varepsilon_{it}$$

dimana:

- IW_{it} = Ketimpangan Wilayah (Indeks)
 β_i = Konstanta
 LN_NM_{it} = Rata-rata Pengeluaran Non-Makanan (Persen)
 LN_MK_{it} = Rata-rata Pengeluaran Makanan (Persen)
 LN_LS_{it} = Rata-rata Lama Sekolah (Persen)
 LN_PM_{it} = Jumlah Penduduk Miskin (Persen)
 ε_{it} = *error term*
 i = 1,2,...,n, menunjukkan jumlah lintas individu (*cross section*)
 t = 1,2,...,t, menunjukkan dimensi runtun waktu (*time series*)

Metode estimasi PLS merupakan bentuk estimasi yang paling sederhana dalam pengujian data panel, yang hanya menggabungkan data *cross section* dan *time series*. Pengujian menggunakan OLS biasa tanpa memperhatikan dimensi individu (*cross section*) dan waktu (*time series*). Berikut ini adalah model regresi untuk metode PLS (Baltagi, 2015a).

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa perpotongan antar bagian berbeda tetapi kemiringannya tetap sama. Teknik estimasi data panel menggunakan metode FEM dengan menggunakan variabel dummy (*variabel dummy*) yang memiliki nilai 0 untuk variabel yang tidak berpengaruh dan 1 untuk variabel yang memiliki pengaruh. Fungsi dummy adalah untuk menangkap perbedaan antara intersep dari penampang. Pemodelan ini lebih dikenal dengan teknik *Least Square Dummy Variables (LSDV)* (Baltagi, 2015a).

Error hitung *time series* dan *cross section* digunakan untuk meningkatkan inefisiensi metode kuadrat terkecil yang dapat diperbaiki dengan menggunakan *Random Effect Model*. Generalisasi hasil variasi estimasi kuadrat terkecil adalah Model Efek Acak. Bersifat random, atau dengan kata lain tidak adanya hubungan yang kuat antara regressor yang tidak teramati, merupakan asumsi dari *Random Effect Model* (Baltagi, 2015b).

Uji Chow merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih model pendekatan terbaik antara *common effect* dan *fixed effect* dengan melihat nilai distribusi F statistik. Jika nilai probabilitas dari distribusi statistik F lebih dari tingkat signifikansi yang ditentukan, model yang digunakan adalah efek umum dan jika nilai probabilitas dari distribusi statistik F lebih kecil dari tingkat signifikansi, model yang digunakan adalah pendekatan efek tetap (Baltagi, 2015b).

Cara untuk memilih model terbaik adalah dengan melihat statistik chi square dengan derajat kebebasan ($df = k$), di mana k adalah jumlah koefisien variabel yang diestimasi. Jika pengujian menunjukkan hasil yang signifikan berarti menolak H_0 artinya metode yang dipilih adalah *Fixed Effect* dan sebaliknya jika tidak signifikan maka model terbaik adalah *Random Effect* (Baltagi, 2015b).

Uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM) dilakukan untuk memilih metode terbaik antara *Common Effect* (CEM) dan *Random Effect* (REM). Kesimpulan dari hasil pengujian adalah dengan melihat nilai penampang Breusch-Pagan. Jika nilai penampang Breusch-Pagan lebih kecil dari taraf signifikansi (α) maka metode *Random Effect* (REM) lebih baik, begitu pula sebaliknya jika nilai penampang Breusch-Pagan lebih besar dari tingkat signifikansi (α) maka metode *Common Effect* (CEM) lebih baik (Baltagi, 2015b).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Regresi *Random Effects Model*
Variabel Dependen= Ketimpangan Wilayah

| Variabel Independen | Model REM |
|---------------------|-------------------|
| C | 0,284 (0,005)* |
| MK | 0,098 (0,029)* |
| NM | -0,003 |

| | |
|---|----------------------|
| | (0,920) |
| LS | -0,033 (0,536) |
| PM | 0,012 (0,024)* |
| R-squared | 0,982 |
| F-Statistic | 0,000 |
| Cross-section Chi-square (Uji Chow) | 290,229 (0,000)* |
| Cross-section Random (Uji Hausman) | 2,5725 (0,632)*** |
| Cross-section Breusch Pagan (Uji LM) | 2,005 (0,157)*** |

Sumber : *Processed Data Eviews 9.0*

Information:

* = Signifikan (α 0.01), ** = Signifikan (α 0.05), *** = Signifikan (α 0.10)

Berdasarkan hasil uji Chow yang menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik daripada *Common Effect Model* (CEM) dan hasil dari Uji Hausman yang menghasilkan *Random Effect Model* (REM) lebih baik daripada *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil pengujian LM menunjukkan bahwa metode *Random Effect Model* (REM) lebih baik daripada *Common Effect Model* (CEM). Sehingga *Random Effect Model* (REM) adalah yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini.

$$PE_{it} = 0,284 + 0,098MK_{it} - 0,003NM_{it} - 0,033LS_{it} + 0,012PM_{it}^*$$

Koefisien konstanta sebesar 0,2839, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh variabel bebas yang digunakan sama dengan 0 (nol), maka ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Lampung sebesar 0,2839 indeks. Rata-rata pengeluaran makanan digunakan untuk membiayai segala kebutuhan hidup seseorang dan sebagai stimulus bagi penurunan tingkat ketimpangan. Menurut Todaro & Smith (2015) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk kepentingan publik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran makanan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini disebabkan sebagian pendapatan daerah dialokasikan untuk pengeluaran belanja konsumsi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rata-rata pengeluaran makanan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja konsumsi. Semakin besar pengeluaran masyarakat dalam kategori makanan akan berdampak pada peningkatan konsumsi yang baik pada daerah tersebut. Penurunan ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Lampung dapat terjadi karena pengalokasian dana pengeluaran pengeluaran masyarakat digunakan untuk membiayai segala kebutuhan dan sebagai stimulus bagi menekan ketimpangan yang terjadi. Rata-rata pengeluaran makanan harus dilakukan secara efisien agar dapat meningkatkan kesejahteraan suatu wilayah. Ketika dana pengeluaran masyarakat dialokasikan lebih banyak untuk konsumsi, maka terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi dan menekan ketimpangan suatu wilayah.

Rata-rata pengeluaran non makanan tidak signifikan. Menurut Ariani et al. (2008), pengeluaran total dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pengeluaran untuk pangan dan barang-barang bukan pangan. Proporsi antara pengeluaran pangan dan bukan pangan juga digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga. Dari proporsi pengeluaran pangan dapat diungkapkan bahwa semakin tinggi proporsi pengeluaran pangan berarti tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga semakin rendah atau rentan. Berdasarkan data di atas pengeluaran pangan lebih besar daripada pengeluaran non pangan, ini berarti tingkat kesejahteraan rumah tangga responden masih rendah. Rumah tangga lebih mengutamakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu, yakni berupa pangan, apabila kebutuhan dasar tersebut sudah terpenuhi, maka keluarga akan mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan non pangan.

Peningkatan proporsi pengeluaran untuk kelompok pangan dapat menjadi indikator menurunnya kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan penduduk sangat berpengaruh terhadap akses ekonomi rumah tangga terhadap pangan sehingga juga mempengaruhi kuantitas dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Semakin menurunnya tingkat kesejahteraan rumah tangga, maka rumah tangga akan lebih memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pangannya yang berguna untuk mengatasi rasa lapar, sehingga kualitas pangan kurang diperhatikan. Sebaliknya, rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan tinggi, akan mampu mencukupi kebutuhannya tidak hanya untuk pangan, namun juga untuk non pangan.

Variabel rata-rata lama sekolah tidak signifikan. Saat seseorang memiliki pendidikan yang lebih tinggi yang dibarengi dengan produktivitas yang juga tinggi maka akan mengurangi pula tingkat ketimpangan pendapatan. Pendidikan yang cukup dan memadai akan mempengaruhi tingkatan pendapatan seseorang dan membuat ketimpangan wilayah menjadi semakin merata. Ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya perbedaan produktivitas tenaga kerja dan perbedaan kualitas pendidikan. Ketika tenaga kerja memiliki produktivitas yang tinggi, maka lama sekolah akan berjalan beriringan dengan besaran pendapatan yang akan diterima. Karena ketika tenaga kerja berpendidikan tinggi namun tidak produktif saat bekerja, sangat mungkin memiliki pendapatan yang lebih rendah.

Pada penelitian ini dinyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan pada rata-rata lama sekolah justru tidak berpengaruh pada ketimpangan wilayah di kabupaten/kota di Lampung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni & Monika (2017) yang menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Anshari et al. (2019) bahwa rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah yang dapat diindikasikan bahwa pendidikan tidak selalu mempengaruhi ketimpangan wilayah.

Sedangkan peningkatan jumlah penduduk miskin akan mendorong ketimpangan wilayah yang terjadi. Alasan penduduk miskin dipandang sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk miskin yang besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah meningkatnya ketimpangan wilayah. Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat dan menekan ketimpangan wilayah yang terjadi.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Sumber daya manusia merupakan modal bagi pertumbuhan ekonomi karena berhubungan dengan faktor produksi. Modal manusia merupakan salah satu modal pembangunan manusia sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Pekerja yang memiliki produktivitas tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian ini, jumlah penduduk miskin dapat meningkatkan ketimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, penurunan jumlah penduduk miskin dapat memicu penurunan pada ketimpangan wilayah.

Dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan peningkatan konsumsi dengan mengalokasikan dana untuk konsumsi makanan suatu daerah. Perlunya menurunkan jumlah penduduk miskin dengan cara melakukan kebijakan dalam mengatur pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat memengaruhi peningkatan pada jumlah penduduk miskin sehingga akan berdampak pada penurunan jumlah ketimpangan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, R. H., & Tjahya, E. (2007). Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *The World Bank Office Jakarta*.
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 196–210.
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 494. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.4990>
- Ariani, M., Rachman, H., Hardono, G., & Purwantini, T. (2008). Analisis wilayah rawan pangan dan gizi kronis serta alternatif penanggulangannya. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 1(1), 66–73.
- Arifin, A. Z. (2018). *Manajemen Keuangan*. Zahir Publishing.
- Atmanti, H. D. (2005). Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. *Dinamika Pembangunan*, 2(1), 30–39.
- Bahrin, Syaparuddin, & Hardiani. (2014). Analisis Pendapatan dan Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2(1).
- Baidhawiy, Z. (2015). Kemiskinan dan Kritik Atas Globalisme Neo-Liberal. In *LP2M IAIN Salatiga*.
- Baltagi, B. H. (2015a). Panel Data. *Oxford University Press*.
- Baltagi, B. H. (2015b). *The Oxford Handbook of Panel Data*. Oxford University Press.
- Conceicao, P. (2020). *Human Development Report 2020*. http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/UGA.pdf
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 102–117. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>
- Hasang, I., & Nur, M. (2020). *Perekonomian Indonesia* (pp. 1–207). Ahlimedia Press.
- Haughton, J., & Khndker, S. R. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Jhingan, M. L. (2011). *The Economics of Development and Planning* (40th ed.). Vrinda Publications (P) Ltd.
- Kalalo, T., Engka, D. S. M., & Maramis, M. T. B. (2016). Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(01), 818–830.
- North, D. C. (1955). Location Theory and Regional Economic Growth. *Journal of Political Economy*, 63(3), 243–258. <https://doi.org/10.1086/257668>
- Rycroft, R. S. (2018). The Economics of Inequality, Discrimination, Poverty, and Mobility. In *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9781315699929>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development. In *Pearson*. <https://doi.org/10.26417/ejes.v3i1.p133-142>
- Wahyuni, R. N. T., & Monika, A. K. (2017). Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(1), 15. <https://doi.org/10.14203/jki.v11i1.63>
- Williamson, J. G. (1965). Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns. *Economic Development and Cultural Change*, 13(4), 1–84.
- Williamson, S. D. (2018). *Macroeconomics Sixth Edition* (Sixth Edit). Pearson Education Limited. www.pearsonglobaleditions.com
- Zaili, R., Adiando, & Dadang, M. (2020). Pembangunan Berkelanjutan Dalam Bingkai Otonomi Daerah. In *Taman Karya*.